

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi data keuangan, melakukan pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi tidaklah dapat dipisahkan dengan masalah informasi, khususnya informasi keuangan. Tujuan utama akuntansi adalah bagaimana menyajikan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif berhasil guna untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya, baik bagi pihak internal organisasi, yaitu manajemen, maupun bagi pihak eksternal, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan juga pemerintah. Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan atau yang lebih kita kenal dengan nama laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu didukung oleh suatu sistem akuntansi yang baik dan andal. Secara tepat waktu, akurat, lengkap, andal, dan terpercaya, sehingga berhasil guna untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya, baik bagi pihak internal organisasi, yaitu manajemen, maupun bagi pihak eksternal, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, dan juga pemerintah. Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan atau yang lebih kita kenal dengan nama laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu didukung oleh suatu sistem akuntansi yang baik dan andal.

Sistem akuntansi sebagai sistem yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan menjadi sangat penting untuk menjamin apakah informasi yang dihasilkan cukup akurat atau tidak. Setiap pengambilan keputusan ekonomi tentunya memerlukan informasi keuangan yang akurat agar keputusan yang diambil tepat dan berhasil. Sistem akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkait sehingga membentuk satu mekanisme untuk mencapai tujuan akuntansi, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, lengkap andal dan terpercaya.

Laporan keuangan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna kalau laporan tersebut dapat menyajikan informasi yang benar

dan dapat menggambarkan secara obyektif sifat dan kondisi organisasi atau usaha yang dilaporkan sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu jenis industri tertentu tidak akan sama dengan industri yang lainnya, khususnya dilihat dari penekanan informasi yang disajikannya. Demikian pula dengan sistem akuntansi sebagai sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Kalau laporan keuangan untuk masing-masing jenis usaha berbeda khususnya dari sisi informasi yang diungkapkan, maka sistem akuntansi yang diterapkan untuk masing-masing jenis usaha juga akan berbeda sesuai dengan sifat dan karakteristik dari jenis usaha yang bersangkutan. Sistem akuntansi untuk usaha manufaktur akan berbeda dengan sistem akuntansi untuk perbankan, sistem akuntansi untuk perbankan juga akan berbeda dengan sistem akuntansi untuk bank sentral karena karakteristik dengan sistem akuntansi untuk bank sentral pada dasarnya berbeda dengan usaha perbankan.

Tidak terkecuali dengan sistem akuntansi di Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral. Beberapa kebijakan pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi telah diterapkan. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan Bank Indonesia memiliki karakteristik dan tugas yang berbeda bahkan dengan bank umum lainnya yang pada dasarnya masih berada pada satu industri. Bank Indonesia sebafei bank sentral lebih berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan pemeliharaan sistem perbankan nasional, sehingga tidak bersifat komersial. Untuk itu sistem akuntansi di Bank Indonesia cenderung mengarah pada penyediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam hal pengendalian uang beredar, kelancaran sistem, dan pemeliharaan sistem perbankan yang sehat. Operasional kegiatan Bank Indonesia termasuk pemrosesan transaksi dan pembukuan sangat tergantung pada keandalan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sifat transaksi Bank Indonesia yang kompleks dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Banklainnya, selain itu informasi yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal Bank Indonesia maupun pihak eksternal.

Namun demikian, sebagai lembaga negara yang strategis dan independen, Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat, yang salah satu wujudnya adalah dengan menyampaikan laporan keuangan publikasi, harus mampu memperlihatkan kepada masyarakat bahwa laporan keuangan dipublikasikan tersebut merupakan laporan keuangan yang wajar dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum. Oleh karena itu, maka perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa sistem akuntansi yang diterapkan di Bank Indonesia merupakan sistem yang andal dan dapat dipercaya.

B. Tujuan Dan kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dengan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan terhadap **“Penerapan Sistem Akuntansi Bank Indonesia Dalam Mendukung Budaya Keterbukaan Dan Transparansi Laporan Keuangan”**, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi
- b. Untuk mengetahui perbedaan sistem akuntansi Bank Indonesia dengan Kank komersial
- c. Untuk mengetahui peranan sistem akuntansi bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis maupun praktis.

- a. Kegunaan Secara Akademis
 1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta menambah ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah.
 2. Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.
- b. Kegunaan Secara Praktis

Bagi Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan suatu kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi,

sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi Bank Indonesia agar masyarakat lebih mengenalnya.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik pengalaman lapangan (PPL) dilaksanakan pada kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Berikut merupakan informasi data lembaga tempat pelaksanaan PPL.

Nama Instansi : KPw Bank Indonesia Kediri

Alamat : Jl. Brawijaya No.2 Kota Kediri

No. Telp : (0354) 682112

Taggal Pelaksanaan : 01 Februari – 28 Februari 2019

Hari : Senin – Jum'at

Waktu : Pukul. 07.30 – 17.00 WIB

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Bank Indonesia

Bank sentral merupakan lembaga keuangan sentral yang memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian suatu negara. Secara garis besar, peranan strategis bank sentral dapat terlihat dari enam peran fungsi bank sentral, yaitu sebagai bank sirkulasi, kasir pemerintah, *bankersbank*, otoritas moneter, otoritas sistem keuangan dan otoritas sistem pembayaran.¹

Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004.²

1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1983 – 1997

Perkembangan dunia perbankan dimulai pada perubahan kebijakan Bank Indonesia (BI) melalui regulasi moneter dan perbankan tahun 1983 sampai dengan 1991 menuntut perubahan terhadap tata perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 14/1967 dengan UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Berdasarkan UU No. 7/1992 tersebut, BI diberikan wewenang

¹Iskandar Simorangkir. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. (Depok: Raja Pers, 2014). Hal. 11

²https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx Diakses pada tanggal 27 Februari Pukul 14.00 WIB

dalam penetapan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek permodalan, kualitas aset, kekuatan manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan bank. Sebelum berdirinya bank Indonesia, kebijakan moneter, perbankan dan sistem pembayaran berada ditangan pemerintah.³ Selama periode 1983-1997, BI pernah dipimpin oleh Arifin M. Siregar (1983-1988), Adrianus Mooy (1988-1993), dan J. Soedradjad Djiwandono (1993-1998). Selama periode 1983-1997, dilakukan pembukaan beberapa kantor cabang (KC) yaitu KC Dili (24 Juli 1985), KC Padang Sidempuan (29 Januari 1987), KC Palangkaraya (11 Agustus 1982), dan KC Batam (12 Mei 1993).

2. Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia

Dalam periode ini tugas pokok dan rincian tugas Bank Indonesia tidak mengalami perubahan landasan hukum, yaitu tetap berdasarkan UU No.13/1968 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia dan UU No.14/1967 tentang Perbankan. Dalam periode ini tugas pokok dan rincian tugas Bank Indonesia tidak mengalami perubahan landasan hukum, yaitu tetap berdasarkan UU No.13/1968 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia dan UU No.14/1967 tentang Perbankan. Perubahan fundamental yang terjadi pada periode ini adalah dari segi pendekatan dan pola pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, karena dalam periode ini Bank Indonesia menerapkan kebijakan deregulasi di bidang moneter dan perbankan yang merupakan bagian dari program deregulasi dan debirokratisasi secara bertahap yang dilakukan oleh Pemerintah di sektor keuangan dan perekonomian pada umumnya.

Langkah deregulasi tersebut merupakan respon terhadap perkembangan eksternal dan internal yaitu kebutuhan untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien dan tangguh, mampu menjangkau masyarakat yang terpencar di Nusantara serta mampu berkiprah secara internasional, dan upaya secara bertahap mengembalikan Bank Indonesia secara murni sebagai Bank Sentral. Dengan langkah tersebut, organisasi Bank Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan untuk

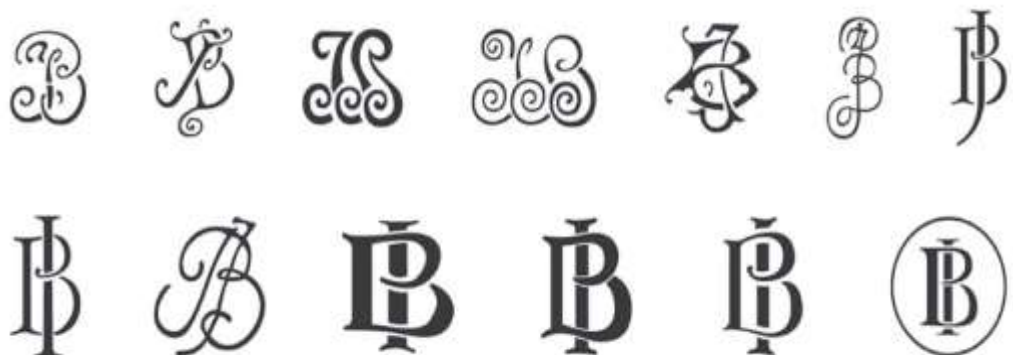
³ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 38.

penataan organisasi Bank Indonesia yang lebih baik. Upaya lainnya adalah pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Bank Indonesia untuk lebih menyelaraskan strategi dan peran Bank Indonesia dengan Repelita. Diawali dengan simulasi penyusunan Renstra Bank Indonesia 1984/89 dengan bantuan tenaga ahli dari *Federal Reserve*, disusul dengan penyusunan Renstra Bank Indonesia yang sesungguhnya untuk periode Repelita 1989/94 yang mencakup misi, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bank Indonesia. Atas dasar Renstra tersebut, ditetapkan arahan tahunan Direksi Bank Indonesia yang dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Adapun bank sentral di Indonesia dinamakan bank Indonesia yang didirikan pada tahun 1953.⁴

3. Profil Bank Indonesia

1. Nama Lembaga : Bank Indonesia
2. Alamat Perusahaan : Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat
3. Status Perusahaan : Bank Sentral yang bersifat Independen
4. Gubernur Bank Indonesia : Perry Warjiyo
5. Deputi Gubernur Bank Indonesia : Mirza Adityaswara

Gambar 1



Perkembangan Logo Bank Indonesia

⁴ Bambang Widjajanta, Aristanti Widyarningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Praya, 2007), hal. 148.

Sementara untuk logo Bank Indonesia Berakar pada logo *De Javasche* Bank, dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Diawal berdirinya, logo bank mengadaptasi logo *De Javasche* bank dengan mengubah huruf J menjadi I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring perkembangan jaman dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang diembannya, logo Bank Indonesia diubah menjadi lebih solid, tegas, dan berwibawa seperti yang kita lihat sekarang ini.

Logo *De Javasche* Bank yang ditampilkan bukanlah logo resmi melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan *De Javasche* Bank. Logo bank Indonesia sampai akhir tahun 1980-an juga merupakan logo yang tampil pada uang-uang terbitan Bank Indonesia dan bukan merupakan logo resmi. Baru tiga logo sejak 1990-an yang merupakan logo resmi yang digunakan sebagai logo korporat.⁵

4. Visi, Misi Dan Nilai Strategis Bank Indonesia

a. Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara emerging markets.

b. Misi

- 1) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- 2) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- 4) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural

⁵<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Default.aspx> diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul. 16.00 WIB

pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

- 5) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- 6) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- 7) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

c. Nilai-Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah:

- (i) Kejujuran dan integritas (trust and integrity);
- (ii) Profesionalisme (professionalism);
- (iii) Keunggulan (excellence);
- (iv) Mengutamakan kepentingan umum (public interest); dan
- (v) Koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

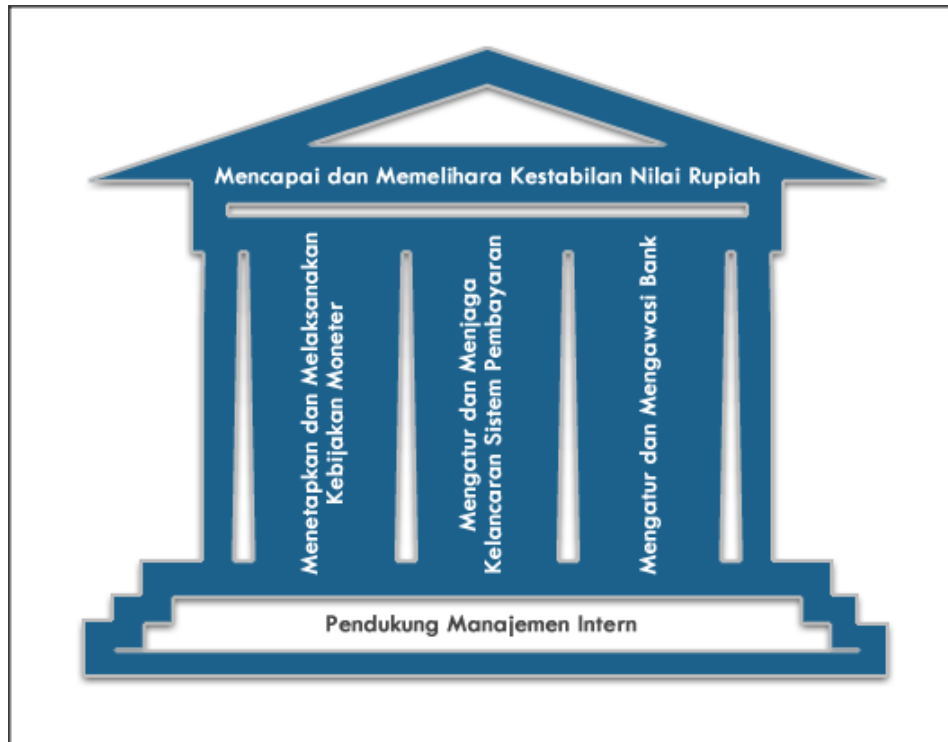
5. Tujuan dan tugas Bank Indonesia

a. Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

b. Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar.



6. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan bank Indonesia selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan bank Indonesia berada diluar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.⁶

a. Lembaga Negara yang Independen

Bank sentral di Indonesia adalah bank Indonesia (BI). Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan

⁶ Yoyo Sudaryo, Aditya Yudanegara, *Investasi bank dan lembaga keuangan*, (Yogyakarta: Andi Anggota IKAPI, 2017), hal. 100.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut.. Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi sebagai penasehat dan memberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah.⁷ Selain itu, bank sentral dalam perannya menjaga kestabilan nilai tukar dan nilai rupiah terhadap inflasi. Maka, penargetan tidak pernah mengharuskan bank sentral untuk mengfokuskan hanya pada satu variabel kunci saja. Namun, dimodifikasi bergantung pada kondisi ekonomi.⁸

b. Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Landasan hukum tentang kelembagaan otoritas moneter yang disebut bank sentral di Indonesia di atur dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Sejak itu, sudah terjadi sebanyak 3 kali perubahan melalui:

- 1) UU No. 3 tahun 2004
- 2) UU No. 2 tahun 2008

⁷ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hal. 141.

⁸ Frederic S. Mishkin, *Ekonomi uang, Pasar, dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 74.

3) UU No. 6 tahun 2009.

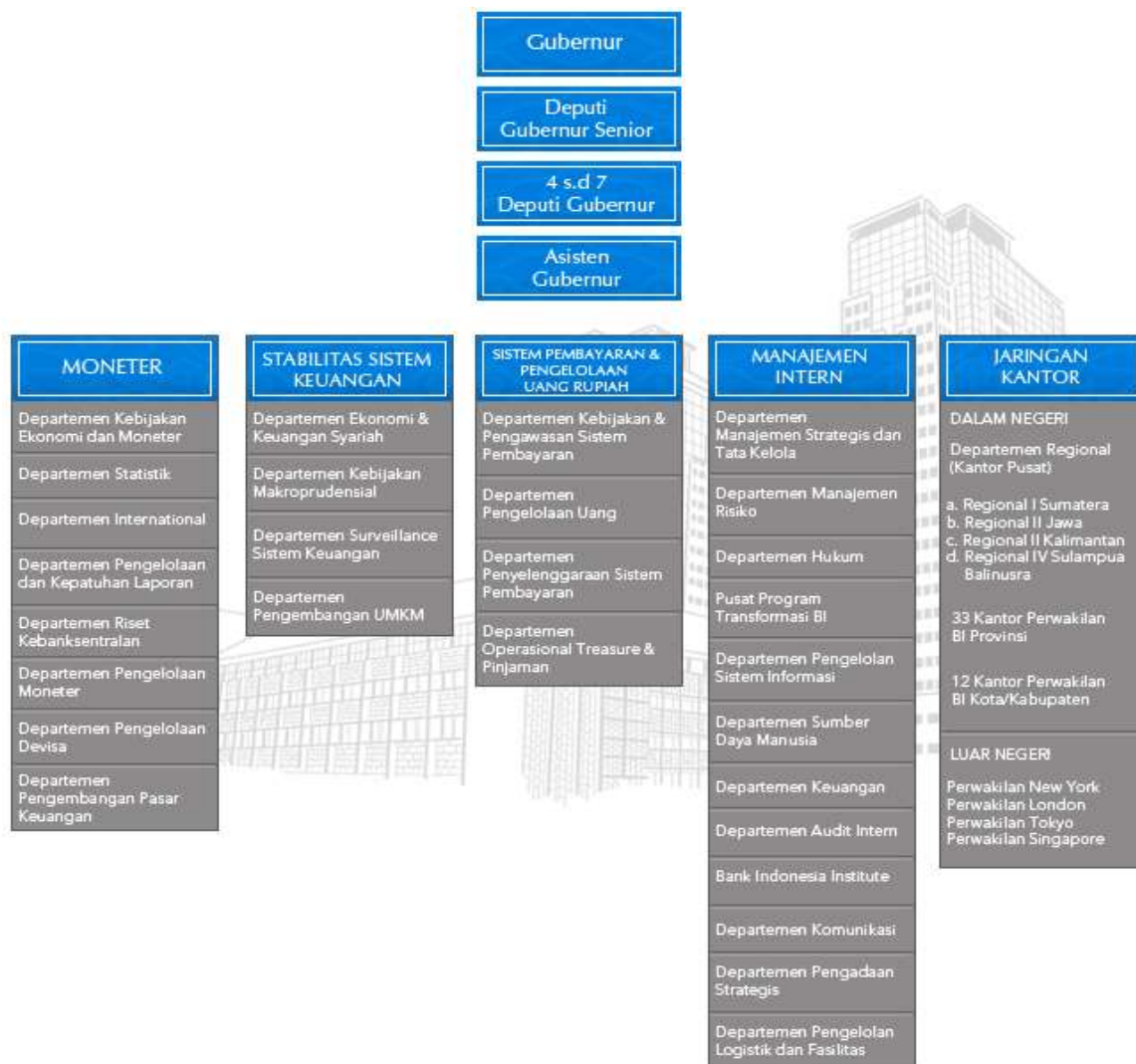
Ketentuan mengenai bank sentral dalam Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas bagi bank sentral. Sebagai lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter.⁹

7. Organisasi Bank Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.¹⁰

⁹A.M. Fatwa. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*.(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 131.

¹⁰Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/organisasi/Contents/Default.aspx> pada tanggal 27 Februari 2019 pukul. 19.00 WIB



Adapun yang sekarang menjadi gubernur Bank Indonesia adalah bapak Perry Warjiyo. Sedangkan untuk kepala bank Kantor perwakilan bank Indonesia Kediri dipimpin oleh bapak Djoko Raharto.

8. Kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

B. Profil KPw Bank Indonesia Kediri

1. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia yang mendukung efektifitas pelaksanaan tugas kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Misi :

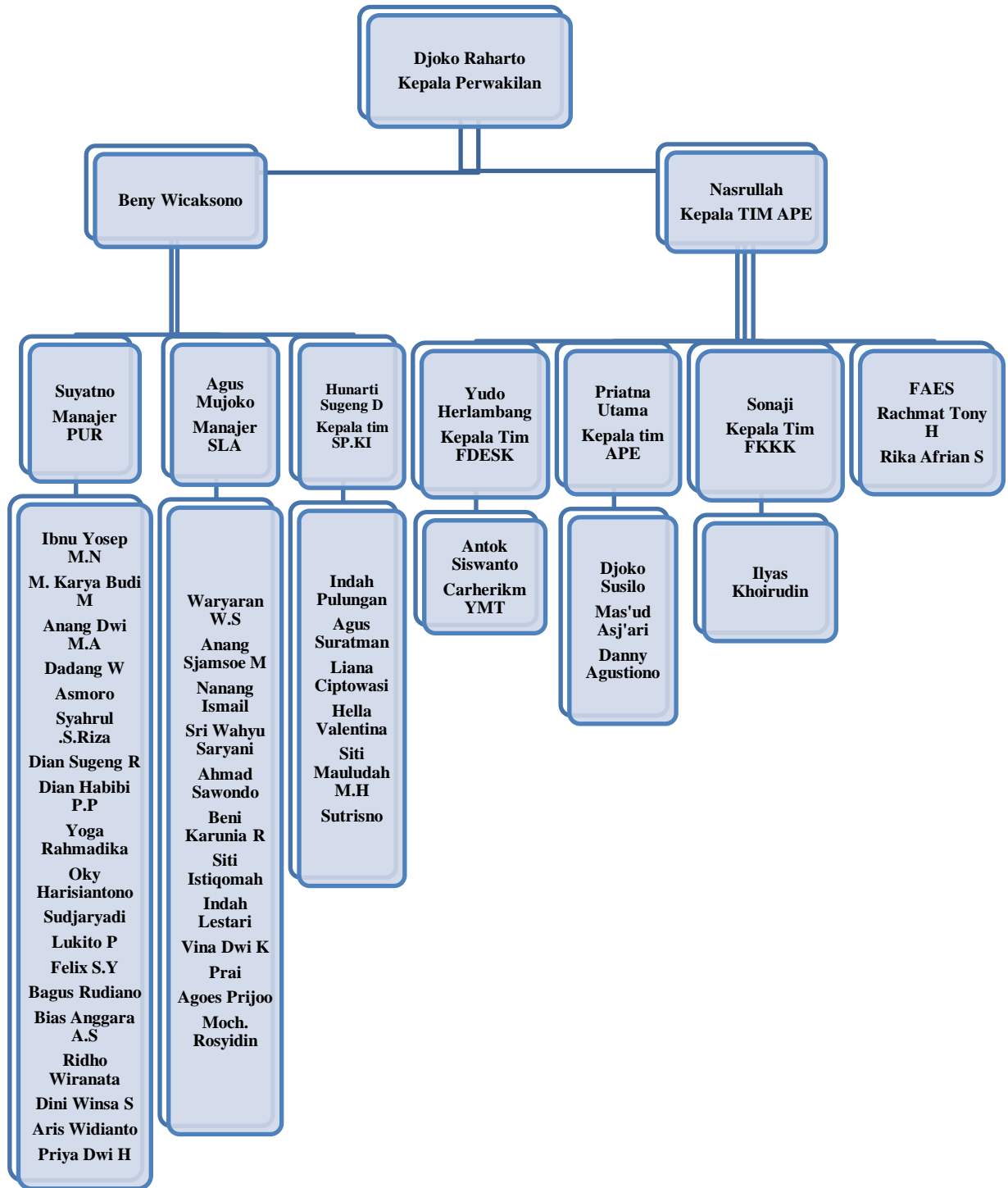
Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas nilai keuangan, efektifitas pengelolaan nilai rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

2. Tugas Pokok Bank Indonesia

- a. Melaksanakan fungsi *advisory* kebijakan kepada kepala daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
- b. Mendukung pelaksanaan fungsi *Regional Financial Surveillance* (RFS) dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Melaksanakan fungsi statistik ekonomi dan keuangan daerah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dan/atau kebijakan di kantor pusat maupun daerah.
- d. Melaksanakan fungsi pengelolaan Uang Rupiah (PUR) meliputi perencanaan, pendistribusian dan pengelolaan uang, serta layanan kas.
- e. Melaksanakan fungsi Sistem Pembayaran (SP).

3. Struktur Organisasi dan Jabatan KPw Bank Indonesia Kediri

Gambar 3: Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri



I. Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi

- a. Fungsi Data dan Statistik ekonomi dan keuangan

Tugas Pokok :

1. Mengumpulkan Informasi, mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
2. Melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory.
3. Melaksanakan kegiatan liaison dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi *advisory*.
4. Mendukung penyusunan *Regional Financial Account* (RFS) dan/atau *Regional Balance Sheet* (RBS) Provinsi.
5. Mengelola dan menatausahakan laporan bank dan non bank (a.l. sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan *helpdesk*)
6. Mengelola pelayanan Informasi Debitur Individual (IDI) dan penanganan keluhan terkait data sistem Informasi Debitur (SID) *).
*) Sampai dengan pengalihan pengelolaan SID dari Bank Indonesia ke OJK.

b. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans

Tugas Pokok :

1. Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah.
2. Melakukan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.
3. Mendukung pelaksanaan RFS Provinsi.
4. Mendukung penyusunan proyeksi makro ekonomi daerah.
5. Mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.

c. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka pengendalian inflasi dalam wilayah kerja dan/atau antar wilayah kerja.
 2. Melakukan koordinasi dan program kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
 3. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategis BI Wide (*One Voice*), termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi satuan kerja Kantor Pusat di daerah.
 4. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi, termasuk melakukan penyesuaian terhadap materi/publikasi eksternal sesuai dengan kebutuhan daerah.
 5. Melaksanakan forum-forum terkait dengan pengembangan dan kerjasama ekonomi yang melibatkan *stakeholders* daerah.
 6. Melakukan kegiatan sosialisasi dan *capacity building* kepada *stakeholders*.
 7. Menyediakan layanan informasi publik (termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID daerah).
 8. Mengelola pelaksanaan program sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa.
 9. Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.
 10. Mengelola perpustakaan Bank Indonesia.
- d. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tugas Pokok:

1. Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi.
2. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM antara lain melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitas program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM.

4. Melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders setempat dalam rangka pengembangan UMKM.

II. Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi

a. Unit PUR

Tugas Pokok:

1. Menyusun Rencana Distribusi Uang (RDU).
2. Melakukan distribusi uang.
3. Melakukan pengelolaan kasanah.
4. Melaksanakan pelayanan kas.
5. Melakukan pembukuan transaksi layanan kas.
6. Melakukan administrasi dan analisis uang palsu (upal), termasuk yang dilakukan di laboratorium upal:
 - a) Klarifikasi keaslian uang Rupiah dari perbankan, masyarakat, dan aparat penegak hukum (Kejaksaan, POLRI).
 - b) Analisis dan tata usaha upal (a.l. melalui *BI Counterfeit Analysis Center/BI-CAC*):
 - c) Pemberian keterangan ahli terkait dengan keaslian uang Rupiah.
7. Melakukan administrasi dan *helpdesk* setoran dan penarikan bank:
 - a) Fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), dan rencana penyetoran dan penarikan bank,
 - b) Administrasi data penyetoran dan penarikan bank.
8. Melakukan perencanaan modal kerja dan melaksanakan kegiatan pengolahan uang.
9. Melakukan pemeliharaan peralatan pengolahan uang dan memantau persediaan *supplies* (a.l. Mesin Hitung, Uang Kertas/MHUK dan Mesin Hitung Uang Logam/MHUL, MSUK, serta MRUK).

b. Unit Operasional SP

Tugas Pokok :

1. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi SP.
2. Mengelola pembukuan transaksi internal dan eksternal
3. Melakukan fasilitas pertukaran warkat debet (Koordinator Pertukaran Warkat Debet/KPWD).

4. Mengelola *Business Continuity Plan* (BCP) Sistem Pembayaran.
 5. Mengelola administrasi dan tata usaha Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan *Two Step Loan* (TSL).
- c. Unit Pengawasan SP, PUR dan KI
1. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

Tugas Pokok :

 - a) Melaksanakan perizinan (antara lain pembukaan, perpanjangan, dan pencabutan) Kegiatan Layanan Uang (KLU).
 - b) Melaksanakan pengawasan KLU.
 - c) Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/ penutupan, serta melaksanakan pengawasan kas titipan.
 2. Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

Tugas Pokok:

 - a) Mengelola data dan Informasi SP dan PUR serta KI.
 - b) Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU).
 - c) Menyusun analisis/kajian terkait SP dan PUR serta KI.
 - d) Merencanakan dan melaksanakan program KI.
 - e) Melakukan koordinasi/kerjasama dan/atau implementasi program KI.
 - f) Memberikan layanan informasi dan mediasi perlindungan konsumen SP.
- d. Satuan Layanan dan Administrasi
1. Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan.

Tugas Pokok :

 - a) Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja.
 - b) Mengelola SDM non-organik
 - c) Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, alat Tulis Kantor (ATK) satuan kerja.
 - d) Melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan kerja.
 - e) Melakukan penghitungan, koreksi, penyetoran dan pelaporan pajak kantor Perwakilan Bank Indonesia.

- f) Mengelola administrasi perjalanan dinas satuan kerja.
- g) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan satuan kerja.
- h) Mengelola kegiatan protokoler.
- i) Menyediakan akomodasi, transportasi, perizinan, sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keprotokolan di wilayah kerjanya.
- j) Melaksanakan kegiatan operasional pengamanan personil, materi, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya.
- k) Melaksanakan pengelolaan peralatan pengamanan di wilayah kerjanya.

C. Pelaksanaan Praktik di KPw Bank Indonesia Kediri

Pada kesempatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada tahun ini, terdapat 9 mahasiswa yang dapat melaksanakan PPL di Bank Indonesia KPw Kediri, diantaranya:

1. Afifah
2. Nila Ayu Puspitasari
3. Luvi Lailatul A.
4. Nila Ro'isatul Ulfa
5. Lilis Hendrawati
6. Nisa Nur Taufiqoh
7. Dwi Nur Laili
8. Dyah Kuntowati Putri Tito
9. Yesika Ayu Wardani

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan di Bank Indonesia KPw Kediri yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 02 Kediri. Pelaksanaan PPL berlangsung mulai tanggal 01 Februari sampai 28 Februari 2019 (20 Hari Kerja).

Dalam melaksanakan PPL kami dituntut untuk selalu aktif dalam praktiknya akan tetapi dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah disepakati di awal pelaksanaan PPL. Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) telah dibagi jadwal disetiap unit kerja di Bank Indonesia KPw Kediri.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama PPL di KPw Bank Indonesia

Kediri adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal | Jenis Kegiatan | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Jum'at, 01 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Breafing dan sharing dengan Bapak Ilyas khoirudin mengenai struktur organisasi Kantor Perwakilan BI Kediri 2. Perkenalan dengan mahasiswa yang magang di KPw BI Kediri 3. Pengenalan kepada seluruh pegawai di Kantor 4. Pembagian tugas dan penempatan posisi selama PraktikPengalaman Lapangan 5. Mengunjungi perpustakaan Bank Indonesia. | Unit SLA Perpustakaan BI Kediri |
| 2. | Senin, 04 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan DPL ke KPw Bank Indonesia Kediri sekaligus serah terima mahasiswa PPL 2. Membantu mengecek arsip dan berkas yang kurang lengkap. 3. Membantu merapikan dan mengelem berkas 4. Breafing tugas penataan buku di perpustakaan | FKKK |
| 3. | Rabu, 06 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pengajian rutin yang diberikan oleh Ust. Ja'far dari Batu dengan tema Adap pergaulan dalam islam. 2. Pemberian materi tentang model pengembangan UMKM binaan Bank Indonesia dari unit FPPU 3. Pemberian materi mengenai pengembangan kemandiriaan ekonomi pesantren dari Bapak Dhanny Agustiono dari unit FPPU 4. Membantu merapikan dan mengelem berkas. 5. Membantu penataan buku di perpustakaan. | FAES |
| 4. | Kamis, 07 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Review materi 2. Pemberian materi kebanksentralan dari unit FAES 3. Membantu membendel berkas | FPPU |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|----------------------------------|
| | | 4. Membantu menginput data hadir seminar Bank Indonesia | |
| 5. | Jum'at, 08 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi tentang sistem pembayaran dari devisi pengawasan SP 2. Membantu merapikan dan pengeleman berkas 3. Membantu menata buku di perpustakaan 4. Pnyampaian materi tentang pengelolaan uang rupiah (PUR) dan CIKUR | FDSEK FPPU |
| 6. | Senin,11 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu merapikan dan pengeleman berkas 2. Membantu menata buku di perpustakaan 3. Mengedit barcode buku di perpustakaan yang masih salah | Tim SP, PUR dan KI |
| 7. | Selasa, 12 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menginput data penukaran jartu GPN 2. Mengikuti seminar Sosialisai data sosial dan ekonomi kota Kediri 2018 3. Membantu menata buku di perpustakaan 4. Membantu mengedit barcode buku di perpustakaan yang masih salah | Tim APE Tim SLA Unit FDSEK |
| 8. | Rabu, 13 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Breafing pembagian tugas. 2. Membantu menginput data statistik bulan Desember 2018 yaitu data DPK, Kredit perbankan dan melakukan analisis. Tugas dari Tim FAES. 3. Bertugas di Tim SLA yaitu mengerjakan di bagian arsip. 4. Meminta tanda tangan untuk arsip PSBI (Program Sosial Bank Indonesia) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Membantu menjilid bukti-bukti transaksi | FAES SLA |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|----------------------|
| | | PSBI (Progam Sosial Bank Indonesia) menjadi arsip. | |
| 9. | Kamis, 14 februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menata buku di perpustakaan 2. Membantu Menginput data ke sistem 3. Membantu membuat powerpoint 4. Materi tentang pengarsipan dan seputar PSBI | SLA FDSEK |
| 10. | Jum'at, 15 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Merapikan dan membaca buku di perpustakaan 2. Membantu menginput data BPR dan BPRS 3. Menginput data beasiswa ke sistem 4. Membantu membuat powerpoint | SLA SKA |
| 11. | Senin, 18 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat tugas menghubungi responden survey mengenai konsumen 2. Membantu update data statistik bulanan 3. Membantu menata buku di perpustakaan | SLA FAES FDSEK |
| 12. | Selasa, 19 Januari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengupdate data statistik bulan januari 2. Membantu merapikan berkas 3. Membantu menata dan merapikan perpustakaan | SLA FKKK |
| 13. | Rabu, 20 Februari 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pengajian rutin 2. Packing buku statistik untuk diedarkan ke perbankan di wilayah kerja 3. Melipat surat dan menata ke dalam buku yang akan di edarkan 4. Mengurutkan buku sesuai data yang sudah ada 5. Mencari materi mengenai keuangan digitas UMKM | SLA |
| 14. | Kamis, 21 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan mereview permasalahan tentang | |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|-------|
| | Februari 2019 | <ul style="list-style-type: none"> kartu tani 2. Membantu membuat laporan mengenai TPID 3. Materi transaksi non tunai | |
| 15. | Jum'at, 22 Februari 2019 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Berkunjung ke tempat peracikan uang yang tidak layak edar. 2. Berkunjung ke Sentra Khasanah Arsip(SKA). 3. Membantu penataan dan perapian berkas di ska 4. Melihat proses kliring 5. Melanjutkan pembuatan laporan TPID Triwulan IV 6. Membaca buku di perpustakaan | FKKK |
| 16. | Senin, 25 Februari 2019 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti serangkaian kegiatan peresmian Mushola Baitul Ihsan di Jurang Sengganni dalam rangka Bersih Indonesia sekaligus Coffe Camp. | SLA |
| 17. | Selasa, 26 Februari 2019 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Membantupenataan buku diperpustakaan 2. Membantu melkaukan penghancuran berkas yang sudah dianggap tidak penting. 3. Membantu melkaukan penempelan kertas pada arsip di map kuning sebagai penanda dalam pengarsipan di Tim APE | FDSEK |
| 18. | Rabu, 27 Februari 2019 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti rutinan mengaji bersama seluruh pegawai Bank Indonesia Kediri. 2. Mencari artikel mengenai kelangkaan jagung di Indonesia 3. Membaca buku di perpustakaan. | FDSEK |
| 19. | Kamis, 28 Februari 2019 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pencarian artikel mengenai kelnagkaan jagung di Indonesia 2. Membaca buku diperpustakaan 3. Review materi selama PPL di Bank Indonesia 4. Penutupan Praktik Pengalaman Lapangan. | |

D. Permasalahan Di Lapangan

Bank Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mempunyai Tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sesuai tujuan dan tugas dari Bank Indonesia selaku Bank sentral sebagaimana tersebut, maka sistem akuntansi yang diterapkan adalah suatu sistem akuntansi yang diutamakan untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar, kelancaran sistem pembayaran, dan pemeliharaan sistem perbankan yang sehat.

Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan yang pertama yaitu sulit untuk mengetahui dan mempelajari praktek akuntansi keuangan di Bank Indonesia. Hal ini bukan terletak pada materi, tetapi lebih kepada ketersediaan informasi. Buku-buku akuntansi yang dijual di toko buku rasanya sangat jarang bahkan mungkin tidak ada yang membahas mengenai akuntansi keuangan Bank Sentral, khususnya akuntansi BI. Tidak hanya itu, materi pelajaran akuntansi yang diajarkan di Universitas juga belum ada secara khusus mengenalkan akuntansi BI.

Yang kedua masih sangat sedikit atau terbatas anggota masyarakat yang mengetahui tentang BI dibandingkan dengan yang mengetahui tentang Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank negara Indonesia (BNI). Kenyataan tersebut dapat dipahami mengingat fungsi dan tugas BI selaku Bank Sentral memang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat luas sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank komersial tersebut diatas. Kondisi tersebut berjalan hingga tahun 1999, dan tahun tersebut pula terjadi perubahan yang mendasar atas keberadaan bank Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai penegasan atas tugas pokok dan independensi BI, tetapi juga menyangkut keterbukaan atau transparansi Bank Indonesia. Yang dimaksud keterbukaan dan transparansi adalah kewajiban bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangannya.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung budaya keterbukaan dan transparansi Bank Indonesia tersebut, maka dianggap perlu untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang sistem akuntansi yang diterapkan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BI yang di publikasikan.

E. Tanggapan Bank Indonesia

Bank Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai Bank Sentral memiliki karakteristik dan tugas yang jauh berbeda dengan bank komersial, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai diamankan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas dari Bank Indonesia yang non profit oriented dan boleh dikatakan unik tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem akuntansi yang diterapkan. income dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bank Indonesia memerlukan berbagai macam informasi baik berupa informasi keuangan maupun non keuangan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Informasi yang disajikan dan yang diterima haruslah akurat, lengkap dan dapat diandalkan, maka dari itu dirasa perlu adanya sistem akuntansi yang dapat membantu menyajikan informasi yang dibutuhkan tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

A. Sistem Akuntansi

Ada beberapa pengertian sistem akuntansi menurut ahli :

- e. Menurut Howard F Stettler, sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasikan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.
- f. Menurut B. Steven A. Moscovice, sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar dan pihak-pihak dalam.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa sistem akuntansi hanyalah berhubungan dengan data finansial saja. Dan sistem akuntansi sesungguhnya merupakan suatu bagian dari sistem informasi manajemen.¹¹

Selain itu sistem akuntansi juga diartikan sebagai sistem yang memproses data dan transaksi untuk memperoleh informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Sistem akuntansi memiliki tujuan yaitu menyediakan informasi sebagai bahan dalam mengambil keputusan dan mendukung kelancaran operasional perusahaan serta membantu ketersediaan informasi yang dibutuhkan perusahaan.¹²

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan

¹¹ Zaki baridwan, *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan akademi akuntansi YKPN), hlm. 4

¹² Nova fara adibah, moch dzulkirom, achmad husaini, *Analisis Sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas dalam upaya peningkatan pengendalian intern*, jurnal Administrasi Bisnis, Vol.26, No.1, hlm. 2, diakses pada 26 februari 2019.

data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi melakukan hal tersebut entah dengan sistem manual atau melalui sistem terkomputerisasi.

13

Sebagai penghasil laporan keuangan yang merupakan alat bantu pengambilan keputusan pihak internal dan eksternal perusahaan, sistem akuntansi yang baik juga harus mampu membantu manajemen dalam melaksanakan pekerjaan manajerial. Pekerjaan seorang manajer dapat dipisahkan menjadi empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus mengandung memiliki prosedur atau proses yang andal yang dapat menjamin ketersediaan informasi keuangan yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan terpercaya serta mampu menjadi alat bantu bagi manajemen dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian. Dalam masa-masa yang lalu, prosedur atau proses akuntansi dilakukan secara manual tanpa alat bantu teknologi. Namun, dengan adanya perubahan lingkungan yang menghendaki adanya efisiensi, keakuratan, dan kecepatan dalam penyajian informasi keuangan, maka peranan teknologi informasi atau komputer menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini hampir semua sistem akuntansi terutama perusahaan yang relatif besar telah memanfaatkan teknologi komputer di dalam proses akuntansi.

B. Sistem akuntansi di Bank Indonesia

Sistem Akuntansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak sama dengan sistem akuntansi bank komersial, meskipun memiliki kemiripan. Hal ini dikarenakan tujuan dan tugas Bank Sentral bukanlah diutamakan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana tujuan bank komersial, melainkan lebih untuk melaksanakan pengendalian moneter. Sistem Akuntansi Bank Sentral ini berdasarkan referensi dari buku-buku yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang merupakan rangkuman dari praktekpraktek akuntansi di Bank Sentral-Bank Sentral, yang diperoleh

¹³ George H Boduar, *Sistem informasi akuntansi*, (ANDI: Yogyakarta, 2006), hlm. 3

melalui work shop antar Bank Sentral di seluruh dunia yang diselenggarakan secara tahunan oleh IMF, serta dari hasil studi komparasi penulis baik melalui bacaan maupun kunjungan di beberapa Bank sentral.

Kebijakan Akuntansi Bank Sentral John Dalton dan Chris Ford⁴, dalam naskahnya "General Purpose Financial Statements for Central Banks" mengatakan bahwa 35 standar dari International Accounting Standard (IAS) mempunyai potensi untuk dapat diterapkan di organisasi perbankan termasuk Bank Sentral, tetapi yang paling relevan untuk bank adalah IAS 1 (Presentation of Financial Statements), IAS 30 (Disclosure in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions), IAS 32 (Financial Instruments: Disclosure and Presentation), dan IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement).

Dalam kaitannya dengan Bank Sentral, mereka antara lain mengatakan bahwa "Ketaatan terhadap standar akuntansi dan pengungkapan yang berlaku, seperti IAS, merupakan prasyarat penerapan Transparansi dan Good Governance". Oleh karena itu, sedapat mungkin dalam menetapkan kebijakan akuntansinya Bank Sentral hendaknya tetap mengacu kepada IAS. Oleh karena tugas dan fungsi Bank Sentral sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa kekhususan perlakuan akuntansi di Bank Sentral dibandingkan dengan bank komersial. Kekhususan-kekhususan tersebut antara lain penyajian kas di dalam neraca, pengakuan hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing, perlakuan akuntansi emas, dan Special Drawing Rights (SDR).

Sebagian besar Bank Sentral di dunia mempunyai tugas sebagai bank sirkulasi, yaitu lembaga yang berwenang untuk menerbitkan⁴ John Dalton dan Chris Ford adalah konsultan IMF yang diperbantukan di Bank Indonesia dalam rangka penyempurnaan Pedoman Akuntansi Bank Indonesia (PAKBI). dan mengedarkan uang kartal (bank notes). Karena fungsi tersebut, maka uang kartal yang berada di tangan masyarakat merupakan kewajiban Bank Sentral kepada masyarakat. Untuk mengetahui jumlah kewajiban Bank Sentral dalam bidang pengedaran uang atau berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat, dilakukan dengan cara

mengurangi seluruh jumlah uang yang telah dicetak dengan uang kas yang ada di khasanah Bank Sentral. Oleh karena itu, pada umumnya Bank Sentral menyajikan kas dalam neraca di sisi kewajiban sebagai pengurang (off-set account) dari jumlah uang yang dicetak dan tidak sebagai komponen aktiva lancar sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank komersial. Metode penyajian seperti ini kita kenal dengan istilah metode neto walaupun tidak menutup kemungkinan ada Bank Sentral yang menganut metode gross dalam menyajikan kas. Pada umumnya Bank Sentral memiliki posisi aktiva bersih dalam valuta asing (net open position) dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kecukupan cadangan devisa negara yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, tujuan utama Bank Sentral bukanlah untuk mencari keuntungan sebagaimana motif bank komersial, melainkan dalam rangka mempertahankan stabilitas harga.

Mengacu kepada IAS 21 dan juga PSAK 10, aktiva dan kewajiban dalam valuta asing harus direvaluasi sejalan dengan naik turunnya kurs valuta asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Hasil revaluasi ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Mengingat fungsi dan tujuan kepemilikan valuta asing oleh Bank Sentral sebagaimana tersebut di atas, Bank Sentral tidak langsung mengakui hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing sebagai keuntungan atau kerugian, tetapi mencatatnya sebagai unrealized income dan disajikan di neraca dalam kelompok ekuitas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bank Indonesia memerlukan berbagai macam informasi baik berupa informasi keuangan maupun non keuangan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Informasi keuangan disajikan dalam suatu laporan, yaitu laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi. Informasi keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap. Untuk dapat menghasilkan informasi sebagaimana tersebut di atas, fungsi akunting harus didukung oleh suatu sistem akuntansi yang memadai. Sistem akuntansi di Bank Indonesia diatur dalam suatu ketentuan berupa Peraturan Dewan Gubernur Bank

Indonesia No.1/12/PDG/1999 tentang Sistem Akunting Bank Indonesia. Berdasarkan PDG dimaksud, sistem akuntansi Bank Indonesia meliputi prinsip-prinsip, kebijakan, hubungan organisasional, prosedur, dan hubungan antarprosedur yang dirancang untuk mencatat transaksi keuangan, mengendalikan kegiatan operasional dan sumber daya Bank Indonesia, serta menyajikan informasi keuangan dalam rangka perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka aspek-aspek sistem akuntansi di Bank Indonesia meliputi: Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI), Buku Pedoman Sistematis Rekening (BPSR), petunjuk teknis otomasi sistem akunting yang terdiri Bank Indonesia Aplikasi Sistem Akunting (BIASA), Bank Indonesia Aplikasi Nostro Gabungan (BIANG), Bank Indonesia Sistem Anggaran (BISA) dan Bank Indonesia Data Akuntansi dan Keuangan (BIDAK), dan telah disempurnakan dan diintegrasikan menjadi Sentralisasi Otomasi Sistem Akunting (SOSA). Sebelum membahas lebih lanjut secara rinci aspek-aspek sistem akuntansi di Bank Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan perkembangan sistem akuntansi di Bank Indonesia sejak era Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Beberapa perubahan telah dilakukan, yaitu antara lain penyempurnaan sistematis rekening dan proses penyusunan neraca gabungan. Rekening dikelompokkan kembali sesuai sifat dan fungsinya dan telah digunakan sistematis yang lebih terstruktur dengan memperkenalkan istilah rekening “grup” (rekening buku besar), rekening “subgrup”, dan rekening “individual”. Pengelompokan grup dan subgrup rekening didasarkan pada tugas pokok Bank Indonesia. Neraca Gabungan Bank Indonesia disusun oleh kantor pusat (Bagian Administrasi Pusat) berdasarkan rekening-rekening buku besar (grup) yang ditatausahakannya. Era BPSN ini merupakan era persiapan untuk komputersasi sistem akunting di Bank Indonesia.

Era Komputersasi Sistem Akunting Dengan semakin beratnya beban tugas yang harus diemban oleh Bank Indonesia, seperti terjadinya perkembangan yang begitu pesat di sektor industri perbankan, maka ada tuntutan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat

waktu. Hal ini diperlukan agar pengambilan keputusan dan kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia mulai mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis komputer. Era komputerisasi sistem akunting Bank Indonesia dimulai pada tahun 1989, yaitu sejak diimplementasikan Bank Indonesia Aplikasi Sistem Akunting atau BIASA

Proses akuntansi dengan memanfaatkan teknologi komputer tersebut dinamakan Otomasi Sistem Akunting (OSA). Sejak saat itu, penyempurnaan penyempurnaan sistem akuntansi di Bank Indonesia terus dilakukan, di antaranya dengan diterbitkannya Prinsip Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI) pada tahun 1995 dan Buku Pedoman Sistematis Rekening (BPSR) pada tahun 1996. Pada awalnya OSA di Bank Indonesia terdiri dari beberapa sistem yang belum terintegrasi.¹⁴

C. Peranan Sistem Akuntansi bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi perbankan secara makroprudensial

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan pokok, antara lain :

- a. Mengendalikan perkembangan uang giral dan uang kuasi melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT). OPT adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi likuiditas perekonomian dengan cara melakukan penarikan maupun ekspansi dana yang ada di perbankan yang merupakan faktor penting dalam penciptaan uang beredar. Agar kebijakan moneter dijalankan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka harus dilakukan secara dan tepat. Untuk itu, diperlukan dukungan informasi mengenai jumlah uang beredar yang tepat waktu dan akurat. Informasi yang akurat dan tepat waktu tersebut

¹⁴Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Pages/Sistem-akuntansi-Bank-Indonesia.aspx> pada tanggal 20 februari 2019 pukul. 09:09 WIB

dihasilkan oleh sistem akuntansi berupa laporan Worksheet Uang Primer. Dengan demikian , efektif tidaknya kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia tidak bisa lepas dari dan tergantung pada memadai atau tidaknya sistem akuntansi yang dimiliki.

- b. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap uang asing dengan mengelola cadangan devisa secara efektif dan efisien. Tinggi rendahnya nilai tukar rupiah terhadap uang asing tergantung pada ada atau tidaknya GAP antara permintaan dan penawaran valuta asing. Agar GAP tidak terjadi, maka Bank Indonesia harus dapat menjaga kecukupan jumlah cadangan devisa yang dimiliki. Untuk itu, Bank Indonesia harus mengelola cadangan devisa secara hati-hati. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko yang akurat amat diperlukan. Informasi dan kemampuan sistem yang memadai untuk analisis yang dalam rangka manajemen resiko dapat disarankan oleh sistem akuntansi yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral sangat memerlukan dukungan sistem akuntansi yang memadai, yaitu yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian jumlah uang yang beredar, kelancaran sistem pembayaran dan pemeliharaan sistem perbankan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Bank Indonesia sesuai dengan kedudukannya sebagai bank sentral memiliki karakteristik dan tugas yang jauh berbeda dibandingkan dengan bank komersial, yaitu memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Begitupun tugas Bank Indonesia yang non profit oriented dan boleh dikatakan unik tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem akuntansi yang diterapkan.

Sistem akuntansi Bank Indonesia pada dasarnya telah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi, Bank Indonesia juga telah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Accounting Standard (IAS). Namun demikian. Sebagai akibat dari keunikan tugas sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi yang tidak lazim dilakukan oleh entitas-entitas lain, tetapi hanya dilakukan oleh bank-bank Sentral. Dalam mencatat transaksi-transaksi seperti ini, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh bank Indonesia adalah mengikuti praktek akuntansi yang diterapkan oleh Bank Sentral pada umumnya, seperti penyajian Kas di sisi kewajiban sebagai offsetting account, dan pengakuan keuntungan atau kerugian hasil revaluasi aktiva dan kewajiban dalam valas pada saat realiasi.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia, maka kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada stakeholder akan selalu dijaga dari segi keandalan, keakuratan, maupun dari segi ketepatan waktunya. Oleh karena itu, sistem akuntansi Bank Indonesia akan selalu dikaji dan disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan best practices, khususnya praktek-praktek yang dilakukan Bank Sentral pada umumnya.

B. Saran

1. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengelola praktik

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebelum terjun ke lapangan tidak hanya satu kali.
 - b. Melakukan kerjasama dengan baik kepada pihak Lembaga yang akan digunakan PPL supaya nantinya program PPL di Lembaga tersebut dapat terus berkelanjutan.
2. Untuk Instansi/Lembaga
- a. Sering melakukan sosialisasi terkait fungsi dan tujuan dari Bank Indonesia sendiri agar masyarakat luas bisa lebih mengenal.
 - b. Menyediakan Informasi terutama terkait sistem akuntansi di Bank Indonesia
3. Untuk mahasiswa sebagai peserta praktik
- a. Lebih mempersiapkan diri untuk melakukan praktik pengalaman lapangan.
 - b. Peserta praktik lebih aktif di tempat lokasi praktik agar proses praktik berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT. Setia Purna Inves
- A.M. Fatwa. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Baridwan, Zaki. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian penerbitan akademi akuntansi YKPN
- Fara adibah, Nova, moch dzulkirom, achmad husaini. *Analisis Sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas dalam upaya peningkatan pengendalian intern*, jurnal Administrasi Bisnis, Vol.26, No.1
- H Boduar, George. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI
- Mishkin, Frederic S. 2009. *Ekonomi uang, Pasar, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana
- Sudaryo, Yoyo. Aditya Yudanegara. 2017. *Investasi bank dan lembaga keuangan*. Yogyakarta: Andi Anggota IKAPI
- Widjajanta, Bambang. Aristanti Widyaningsih. 2007. *Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Bandung: Citra Praya
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/pra-bi/Default.aspx>
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-kebanksentralan/Pages/Sistem-akuntansi-Bank-Indonesia.aspx>
- <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/organisasi/Contents/Default.aspx>

Dokumentasi Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan ke Lembaga



2. Proses perapian dan pengeleman kertas





3. Penyampaian materi tentang Pengelolaan Uang Rupiah dan Kebanksentralan





4. Penataan buku di perpustakaan



3. Seminar sosialisasi data sosial dan ekonomi kota kediri 2018



4. Briefing tugas dan penjelasan tentang penggunaan sistem RMS



5. Penyampaian materi tentang pembayaran non tunai



6. Berkunjung ke tempat peracikan uang yang tidak layak edar



7. Mengikuti pengajian rutin setiap hari Rabu dengan seluruh pegawai



8. Penutupan Praktik Pengalaman Lapangan

